

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori dan Kepustakaan

##### 1. Gerakan Sosial

###### a. Gerakan Sosial: Penjelasan Singkat

Menurut Kamus Sosiologi (2010), gerakan sosial merupakan suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Dengan gaya yang berbeda, Giddens (1993) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*). Dalam Sujatmiko (2006), Borgatta dan Marie menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang mencoba untuk mempromosikan atau menentang perubahan di dalam masyarakat atau kelompok. Tokoh lainnya yaitu Sydney Tarrow (1998) berpendapat, gerakan sosial merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama, rasa solidaritas sosial, dan interaksi sosial yang berkelanjutan antara para elit, penentang dan pemegang wewenang. Gerakan sosial dianggap sebagai sumber harapan (*source of hope*) masyarakat dalam menghadapi perkembangan kehidupan yang makin kompleks (Offe dan Melucci dikutip dalam Sujatmiko, 2002). Bisa disimpulkan bahwa gerakan sosial memiliki definisi yang beragam. Keanekaragaman

konsepsi gerakan sosial merupakan hal yang wajar mengingat ia merupakan suatu fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional yang menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Gerakan sosial akan senantiasa ada dan berkembang selaras dengan kehidupan manusia dan peradaban masyarakat dengan segala dinamika dan problematika yang ada didalamnya.

Gerakan sosial dinilai sebagai sebuah bentuk aktivitas yang khas dari masyarakat sipil (Diano & Porta, 2006). Dalam gerakan sosial, aktor-aktor terlibat secara mandiri dan diikat oleh suatu identitas kolektif yang dibangun atas dasar kebutuhan dan kesadaran untuk keterhubungan (*connectedness*) (Diani and Bison, dikutip dalam Sujatmiko 2006). Gerakan sosial dipandang sebagai suatu gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan. Gerakan sosial lahir sebagai wujud reaksi terhadap permasalahan yang tidak diinginkan rakyat dan adanya keinginan untuk menciptakan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain). Dalam konteks ini tuntutan perubahan seringkali muncul karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

## b. Tipologi Gerakan Sosial

Gerakan sosial memiliki ragam dan tipe gerakan yang variatif. Gerakan sosial bisa mengakomodir dan memobilisasi partisipan dengan jumlah yang sangat terbatas, ratusan, ribuan atau bahkan jutaan orang. Gerakan sosial bisa bergerak dalam lingkup dan batas-batas legalitas yang jelas pada suatu masyarakat, juga bisa pula bergerak secara ilegal sebagai gerakan ‘bawah tanah’ (*underground groups*) (Sujatmiko, 2002).

Klandemans (1997) membagi gerakan sosial menjadi dua tipe, yaitu (1) *Proactive Social Movement* (Pergerakan Sosial Proaktif); dan (2) *Reactive Social Movement* (Pergerakan Sosial Reaktif). Pergerakan sosial proaktif merupakan suatu jenis gerakan sosial yang muncul karena adanya suatu kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat ditolerir, dan tujuan mereka adalah untuk mempromosikan perubahan sosial. Sedangkan pergerakan sosial reaktif ialah gerakan yang muncul karena kondisi tertentu dalam masyarakat mengalami perubahan, dan masyarakat memberikan reaksi untuk menolak perubahan tersebut (dikutip dari Henslin, 2006).

Tipe gerakan sosial lainnya dikemukakan oleh David Aberle (dikutip dari Triwibowo, 2006: xviii), yang mengklasifikasikan gerakan sosial menjadi empat tipe berdasarkan besarnya perubahan sosial yang dikehendaki dan tipe perubahan sosial yang dikehendaki.

<b>Besaran</b>	<b>Tipe</b>	
	<b>Perubahan Perorangan</b>	<b>Perubahan Sosial</b>
Sebagian	<i>Alternative Movements</i>	<i>Reformative Movements</i>
Menyeluruh	<i>Redemptive movements</i>	<i>Transformative Movements</i>

*Tabel 1.0* Tipologi Gerakan Sosial

Tipe pertama yaitu *Alternative Movements*, suatu gerakan sosial yang berusaha mengubah sebagian perilaku orang. Sebagai contohnya gerakan sosial dari *Women Christian Temperance Union* pada kurun waktu 1990-an yang bertujuan mengubah perilaku orang untuk berhenti minum minuman beralkohol. Para anggotanya yakin jika mereka dapat menutup tempat minuman keras, masalah seperti kemiskinan dan kekerasan terhadap istri akan hilang. Tipe kedua adalah *Redemptive Movements*, gerakan sosial yang mencoba mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh, seperti dalam bidang keagamaan. *Reformative Movements*, gerakan sosial yang mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang lingkup yang terbatas. *Transformative Movements* adalah gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh. Tipe ketiga yakni *Reformative Movements* yang mengupayakan reformasi masyarakat pada segi tertentu dengan

ruang lingkup yang terbatas, sebagai contoh gerakan persamaan hak kaum perempuan. Tipe terakhir adalah *Transformative Movements*, suatu gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh, seperti gerakan komunis di Kamboja.

Selain tipe-tipe yang sudah disebutkan di atas, gerakan sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe lagi, yaitu *old social movement* (gerakan sosial lama) dan *new social movement* (gerakan sosial baru). Istilah ini dikembangkan oleh Sosiolog Prancis, Alan Touraine pada 1975 dan Sosiolog Italia yang bernama Alberto Melucci pada 1980. *Old social movement* berfokus pada isu yang berkaitan dengan materi dan biasanya terkait dengan kepentingan satu kelompok saja, misalnya gerakan petani, atau buruh. Sedangkan *new social movement* berkaitan dengan masalah ide atau nilai seperti gerakan feminisme atau lingkungan. Isu dan agenda yang diperjuangkan gerakan sosial baru mencakup tataran kepentingan yang lebih luas, jika dibandingkan dengan gerakan sosial lama. Sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Nash (2005) dikutip dari Suharko (2006), bahwasanya gerakan sosial baru atau biasa disebut GSB berpusat pada tujuan-tujuan non material. GSB menekankan pada perubahan-perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan dalam sektor ekonomi, yang termanifestasikan dalam gerakan lingkungan, gerakan anti-perang, perdamaian, feminisme, dan lain-lain. Tidak hanya itu,

GSB juga berfokus pada isu identitas, gaya hidup, dan budaya dan sebagainya. Pendekatan gerakan sosial baru menekankan pada intinya menekankan pada pemahaman sisi kultural gerakan sosial serta memandangnya sebagai suatu perjuangan produksi makna dan identitas kolektif baru (Canel dalam Sujatmiko, 2002)

Secara kontekstual, GSB dapat dikatakan sebagai bagian dari proses perkembangan peradaban negara-negara maju. Bahkan istilah gerakan sosial baru pertama kali digunakan secara luas merujuk pada fenomena gerakan sosial baru pada pertengahan 1960-an di Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang telah masuk era *post-industrial-economy* atau kondisi ekonomi industrial tingkat lanjut. Pada dasarnya kemunculan GSB merupakan respon terhadap peralihan bentuk-bentuk gerakan sosial kontemporer di negara-negara barat terkait dengan perkembangan dunia pasca-industrial atau pasca-modern (Pichardo, 1997) dalam (Suharko, 2006). Akan tetapi kini, GSB tidak hanya terjadi di negara-negara barat yang notabene merupakan negara maju saja, namun juga di negara-negara berkembang. Fenomena-fenomena gerakan sosial baru banyak pula terjadi di negara berkembang (Singh, 2001). Para ahli pun telah memperluas kajiannya ke berbagai negara sedang berkembang, dan menemukan adanya tipe gerakan sosial yang sama, meskipun latar ataupun konteks perkembangan masyarakat belum mencapai perkembangan masyarakat pasca-industrial.

Untuk mengklasifikasikan suatu fenomena empiris tentang gerakan sosial, apakah masuk kedalam tipe *old social movement* (gerakan sosial lama) atautkah masuk kedalam tipe *new social movement* (gerakan sosial baru) tidaklah mudah. Pichardo dan Singh (dikutip dari Suharko, 2006: 9-12) mengemukakan beberapa pertimbangan dan ciri yang dianggap dapat membedakan antara gerakan sosial baru dengan gerakan sosial lama, antara lain :

1) Ideologi dan tujuan

Gerakan sosial baru mulai beralih dan meninggalkan orientasi isu dan ideologi semacam ‘anti-kapitalisme’, revolusi kelas dan perjuangan kelas, sebagaimana yang diusung dalam gerakan sosial lama. Gerakan sosial baru berkembang dan mulai bertentangan dengan asumsi *Marxian* bahwa semua perjuangan didasarkan atas konsep kelas. Gerakan sosial baru lahir sebagai gerakan sosial lintas kelas yang mengusung isu-isu spesifik dan bersifat non-materialistik. Perangkat aksi GSB tidak menggunakan perangkat politik tradisional untuk mempengaruhi negara, tetapi lebih bergantung pada mobilisasi massa untuk mengubah nilai dan sikap, sebagaimana dalam pengaturan gerakan sosial lingkungan (Abercombie, Hill and Turner, 2000).

Gerakan sosial baru memiliki tujuan membangkitkan isu pertahanan komunal dan masyarakat dalam melawan ekspansi negara dan pasar yang semakin meningkat dan telah masuk kedalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya agen-agen yang memperjuangkan pengawasan dan kontrol sosial seperti kaum anti rasisme, kaum anti-otoritarian, kaum aktivis lingkungan maupun sosial, merupakan manifestasi nyata dari upaya tersebut. Gerakan sosial baru akan selalu berupaya untuk melawan kondisi dan tatanan sosial yang terlalu didominasi oleh negara dan pasar, dan terus menyuarakan perwujudan kondisi yang lebih adil dan bermartabat.

## 2) Taktik dan Pengorganisasian

Gerakan sosial baru tidak lagi menganut model pengorganisasian model politik kepartaian, ataupun model serikat buruh industri. Gerakan sosial baru lebih memilih model pengorganisasian diluar politik normal menerapkan taktik yang mengganggu (*disruptive*), memobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar politik. Gerakan sosial baru identik dengan bentuk aksi-aksi yang tidak biasa, dramatis dengan perencanaan yang matang sebelumnya, lengkap dengan



kostum dan representasi simboliknya. Tujuan utama dari mereka tentu saja untuk memobilisasi opini publik dan mendapatkan perhatian dari publik secara luas.

Gerakan sosial baru pada umumnya merespon isu-isu yang bersumber dari *civil society*. Selanjutnya, dalam segi sasaran perjuangan menurut Cohen (dalam Suharko, 2006) gerakan sosial baru membatasi pada empat hal, yaitu : tidak berjuang untuk kembalinya komunitas-komunitas utopia yang tidak terjangkau di masa lalu; berjuang untuk otonomi, pluralitas dan keberadaan; melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran; dan mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar.

### 3) Struktur

Gerakan sosial baru memiliki struktur yang tidak kaku, bersifat mengalir, untuk menghindari bahaya oligarkisasi. Hal itu diwujudkan dengan adanya upaya rotasi kepemimpinan, melakukan voting untuk semua isu, memiliki organisasi ad hoc yang tidak permanen. Gerakan sosial baru menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu,

dalam bentuk struktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan non-hirarkis.

#### 4) Partisipan atau aktor

Berbeda dengan gerakan sosial lama yang mayoritas partisipannya berasal dari satu 'kelas' tertentu, partisipan gerakan sosial baru berasal dari berbagai basis sosial yang beragam, semisal dalam aspek gender, pendidikan, okupasi, dan kelas. Gerakan sosial baru tidak hanya identik dengan golongan tertentu seperti gerakan sosial lama. Partisipan gerakan sosial baru berjuang melintasi batas-batas sosial demi kepentingan publik yang lebih luas.

Pichardo (1997) menyatakan bahwa partisipan atau aktor dari gerakan sosial baru didominasi oleh individu-individu terdidik, seperti kaum akademis, seniman, agen-agen pelayanan kemanusiaan. Menurut Claus Offe (1985) partisipan gerakan sosial baru tidak mengidentifikasikan diri pada basis-basis aliran mapan, seperti liberal atau konservatif (dalam Suharko, 2006). Partisipan atau aktor GSB berasal dari tiga sektor yaitu: kelas menengah baru, unsur kelas menengah lama (petani, pemilik modal), individu yang menempati

posisi yang tidak terlalu terlibat dalam pasar kerja, seperti mahasiswa.

Gerakan sosial baru adalah gerakan yang plural, dengan dasar pluralitasnya tersebut, gerakan sosial baru dapat mengusung beragam tujuan dan menyuarakan aneka kepentingan publik. Gerakan sosial baru tidak hanya mencakup pihak-pihak dalam wilayah tertentu saja, akan tetapi mampu menjangkau lingkup wilayah yang lebih luas, nasional, hingga internasional. Sebagai contoh, suatu gerakan sosial baru yang mengusung isu dan permasalahan kelestarian lingkungan seringkali mampu menjangkau pihak-pihak secara luas dari berbagai wilayah bahkan dari berbagai negara, itu dikarenakan isu yang mereka usung merupakan masalah bersama yang dialami oleh masyarakat secara luas.

c. Pendekatan Mobilitas Sumber Daya, NGO, dan Organisasi Sukarela

Dalam upaya menganalisis dan memahami gerakan sosial pada masyarakat kontemporer, selain dengan mengembangkan pendekatan *new social movement* (gerakan sosial baru) terdapat pula pendekatan teori mobilisasi sumber daya (*Resource Mobilization Theory/ RMT*). Pendekatan RMT memfokuskan analisisnya pada seperangkat proses kontekstual mengenai pengelolaan sumber daya, dinamika organisasi

dan perubahan politik, yang membuat gerakan sosial untuk mengoptimalkan potensi-potensi struktural yang dimiliki guna mencapai tujuannya. Pendekatan ini berusaha menganalisis bagaimana para aktor gerakan sosial mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka.

Pendekatan teori mobilisasi sumber daya (RMT) memiliki dua model pendekatan, yang pertama adalah pendekatan *political-interactive model* yang dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan MC Adam (Canel dalam Sujatmiko, 2002). Pendekatan ini menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring, serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan *aggrieved groups* (kelompok tertindas) sebagai penentu keberhasilan gerakan sosial. Pendekatan ini juga menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan sistem politik sebagai salah satu faktor kuat penentu keberhasilan gerakan sosial, misalnya jika suatu negara sistemnya sangat kuat dan represif, maka gerakan sosial akan sangat sulit untuk mencapai tujuannya (Phongpaichit dalam Sujatmiko, 2002).

Model yang kedua yaitu *organizational-entrepreneurial* yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Menurut Zald (1997) Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam

menentukan keberhasilan gerakan sosial (dikutip dari Triwibowo 2002: 12). Model ini mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta menjelaskan bahwasanya organisasi formal merupakan *carriers of social movement*. Menurut McCarthy dan Zaid, organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Model pendekatan yang dikembangkan McCarthy dan Zaid memberikan ruang bagi NGO (*Non Governmental Organization*) atau ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) untuk menjadi bagian dari organisasi gerakan sosial. Dalam banyak kasus terdapat suatu fenomena menarik yang menunjukkan bahwa lambat laun gerakan sosial akan bertransformasi menjadi bentuk-bentuk aksi yang lebih terlembaga dan dengan tingkat risiko yang lebih rendah untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini NGO bukan dipandang sebagai sebuah 'substitusi' melainkan sebagai sebuah bentuk kematangan maupun inovasi baru bagi keberlanjutan gerakan sosial (Hochstetler dalam Sujatmiko 2012)

Konsep tentang NGO memiliki kompleksitas kajian yang menarik untuk dianalisis lebih jauh. Korten (2002) mendefinisikan NGO sebagai segala macam organisasi yang bukan milik pemerintah,

dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, Hadiwinata (2003) menyatakan bahwa NGO merupakan suatu organisasi yang melayani kepentingan kaum yang termarginalisasi (dikutip dari Sujatmiko, 2012). Secara umum sebagai sebuah bentuk organisasi, NGO memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki bentuk formal yang terpisah dari negara, berorientasi nirlaba, mempunyai tata kelola yang mandiri, basis keterlibatan atau keanggotaan bersifat sukarela, tidak memiliki kaitan dengan pengembangan agama tertentu, dan tidak berasosiasi dengan politik praktis (Hadiwinata dalam Sujatmiko, 2012: 13).

Dalam ruang lingkup NGO secara umum, terdapat berbagai macam bentuk-bentuk organisasi yang berbeda-beda di dalamnya. Bentuk-bentuk organisasi tersebut antara lain: (1) organisasi sukarela (*voluntary organization* atau VO); (2) organisasi rakyat (*people organization*); (3) kontraktor pelayanan umum (*public service contractor* atau PSC); dan (4) organisasi non-pemerintah 'milik' pemerintah (government non-government atau GONGO) (Korten, 2002).

Bentuk pertama adalah organisasi sukarela, suatu organisasi yang memiliki misi sosial, yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Organisasi ini merupakan gerakan masyarakat yang 'murni', dimana kekuatan dan sumber dananya diperoleh seutuhnya dari masyarakat. Organisasi ini terbentuk karena adanya faktor komitmen

terhadap nilai-nilai yang sama. Corten (2002) menyatakan bahwa organisasi sukarela merupakan alat yang dipakai sukarelawan (*volunteer*) untuk menetapkan identitas dan pengakuan sah atas usaha bersama mereka. Bentuk selanjutnya adalah kontraktor pelayanan umum, yang merupakan organisasi pihak ketiga yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba yang berorientasi terhadap pasar untuk melayani kepentingan umum. Organisasi ini didirikan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Bentuk ketiga yaitu organisasi rakyat, suatu organisasi yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota, dan cukup mandiri. Organisasi serikat buruh, asosiasi pedagang, asosiasi petani adalah beberapa contoh dari tipe organisasi ini. Bentuk organisasi terakhir adalah organisasi non-pemerintah milik pemerintah, yaitu organisasi pada umumnya dibentuk dengan tujuan hanya untuk digunakan untuk menyalurkan bimbingan dan pengawasan pemerintah. Eksistensi organisasi ini tergantung pada dukungan dan sumberdaya pemerintah, struktur kepemimpinannya diangkat dan bertanggung jawab kepada pemerintah (Corten, 2002).

#### d. Komponen Utama dalam Gerakan Sosial

Ada banyak tindakan kolektif maupun perlawanan-perlawanan yang ada dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi tidak semua

tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu gerakan sosial. Tarrow (1998) menjelaskan bahwa konsep gerakan sosial harus memiliki empat komponen yang mendasar (dikutip dari Suharko, 2006: 11). Empat komponen dasar dari gerakan sosial antara lain:

1) Struktur

Gerakan sosial baru memiliki struktur yang tidak kaku, bersifat mengalir, untuk menghindari bahaya oligarkisasi. Hal itu diwujudkan dengan adanya upaya rotasi kepemimpinan, melakukan voting untuk semua isu, memiliki organisasi *ad hoc* yang tidak permanen. Gerakan sosial baru menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu dalam bentuk struktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan non-hirarkis.

2) Tantangan Kolektif (*collective challenge*)

Salah satu hal yang membedakan gerakan sosial dengan tindakan-tindakan kolektif lainnya, seperti bermain sepakbola, menonton pertunjukan musik, adalah adanya tantangan kolektif. Gerakan sosial selalu ditandai adanya tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang 'mengganggu' para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain atau aturan-aturan kultural tertentu. Tantangan kolektif juga ditandai dengan tindakan



menghalangi, membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain yang coba mereka lawan melalui gerakan sosial.

Tantangan kolektif merupakan karakteristik yang paling umum dari gerakan sosial. Tantangan kolektif seringkali disimbolkan dalam bentuk, slogan, corak pakaian, perilaku pribadi, penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang baru ataupun berbeda, dan lain-lain. Tantangan kolektif merupakan hal yang menjadi focal point (titik fokus) bagi para aktor gerakan sosial, untuk memperoleh perhatian dari pihak yang dilawan, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

### 3) Tujuan Bersama

Terdapat banyak alasan mengapa akhirnya individu bergabung dengan gerakan sosial. Alasan-alasan tersebut berbeda-beda tergantung dengan pertimbangan individu masing-masing. Namun, jika dilihat secara konseptual alasan paling jelas mengapa individu tergabung dalam gerakan sosial adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit.

### 4) Solidaritas dan Identitas Kolektif

Pertimbangan kepentingan bersama dari partisipan merupakan penggerak bersama (*common de-nominator*) dari gerakan sosial yang kemudian menjembatani

perubahan yang semula hanya potensi menjadi aksi nyata. Gerakan sosial akan dapat berjalan apabila terdapat perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang seringkali bersumber dari rasa nasionalisme, etnisitas, agama, ataupun kesamaan minat tertentu, misal minat terhadap isu sosial, lingkungan, HAM, Gender, dan lain-lain.

5) Memelihara politik perlawanan

Dengan terus memelihara aksi kolektif melawan pihak tertentu, suatu tindakan perlawanan akan bisa menjadi gerakan sosial. Komponen tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan sosial dalam upaya memelihara politik perlawanan. Aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran di mana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

e. Gerakan Sosial Baru Pelestarian Lingkungan di Indonesia

Sebagai sebuah isu global, permasalahan lingkungan mendapat perhatian serius di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi kemudian memicu munculnya gerakan-gerakan sosial di bidang lingkungan hidup. Keberadaan gerakan sosial dalam bidang lingkungan hidup merupakan proses panjang yang senantiasa mengiringi perkembangan dan kondisi

ekologi bangsa ini. Menurut Purnomo dkk (1989) dalam konteks sejarah gerakan lingkungan hidup di Indonesia yang termanifestasi dalam bentuk NGO (*Non Governmental Organization*) atau secara umum dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebenarnya telah masuk dalam agenda gerakan semenjak 1970-an (dalam Suharko, 1998). Pada masa ini NGO di Indonesia benar-benar tumbuh dengan pesat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar menjadi faktor utama yang mendorong munculnya fenomena tersebut. Pada awal-awal kemunculannya NGO yang ada justru lebih banyak menekankan isu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dibandingkan dengan isu lingkungan. Isu lingkungan baru mendapat artikulasi yang lebih kuat untuk disuarakan tatkala banyak NGO yang menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi juga membawa dampak kerusakan lingkungan dan ekologi yang cukup signifikan.

Gerakan lingkungan hidup di Indonesia memperoleh momentum penguatan pada periode 1980-an, Eldridge (1995) menyebut periode ini sebagai 'gelombang kedua' (*second wave*) aktivitas NGO atau LSM di Indonesia. Wujud konkrit dari gelombang kedua ini dituangkan dalam UULH No 4 tahun 1982 yang banyak mengakomodasi masukan dari NGO lingkungan, melegitimasi eksistensi NGO, dan memberikan ruang bagi NGO dalam konteks pembangunan lingkungan. Pada periode ini, tepatnya pada 15 Oktober 1980 muncul salah satu gerakan

sosial di bidang lingkungan bernama WALHI (Wahana Lingkungan Hidup). WALHI kemudian berkembang menjadi suatu gerakan sosial dan NGO di Indonesia dalam bidang lingkungan yang cukup diakui peranannya serta masih terjaga eksistensinya hingga saat ini. Pada awal berdiri WALHI merupakan forum dari sekitar 150 NGO yang memiliki aktivitas gerakan lingkungan hidup yang beragam, seperti gerakan pelestarian lingkungan dan advokasi lingkungan.

Di Indonesia jumlah gerakan lingkungan dari masa ke masa semakin bertambah banyak. Berbagai gerakan lingkungan yang ada mengusung isu dan permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai, mulai dari isu sampah, penebangan hutan, polusi, pencemaran limbah, pembangunan, aktivitas ekonomi maupun industri yang tidak ramah lingkungan, dan sebagainya. Pada kurun waktu 1995, diperkirakan jumlah NGO lingkungan yang ada di Indonesia mencapai angka antara 1.000-2.000, (Sardi dalam Suharko, 2006). Tak pernah ada data yang menunjukkan jumlah pasti gerakan lingkungan yang ada di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya ialah gerakan lingkungan yang berkembang di Indonesia tidak semuanya dijalankan dengan mempertimbangkan aspek legalitas. Banyak gerakan lingkungan di Indonesia yang bergerak sebagai gerakan bawah tanah (*underground groups*). Kondisi demikian membuat gerakan lingkungan yang ada sulit untuk diidentifikasi dan didata secara pasti.

Dalam sejarah perkembangannya, gerakan lingkungan di Indonesia dapat dikatakan sangat terpengaruh oleh gerakan lingkungan di negara-negara barat. Mayoritas gerakan lingkungan di Indonesia serta para aktivis-aktivisnya seringkali hanya menyoroti dan mempersoalkan dampak proyek-proyek yang bersifat 'mercusuar' atau proyek-proyek raksasa, seperti proyek-proyek Bendungan, PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir), industri-industri raksasa (Aditjondro, 2003). Pernyataan tersebut tentu memiliki dasar dan bukti yang jelas, yang dapat kita amati dari berbagai peristiwa pergerakan lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia selama ini. Pada periode 1970-an banyak gerakan lingkungan yang menyuarakan isu-isu besar seperti penolakan terhadap perusakan ekosistem laut dengan cara penangkapan ikan paus secara modern yang dibiayai oleh FAO dan dukungan dari pakar Norwegia. Peristiwa itu terjadi tepatnya pada tahun 1978 di Pulau Lembata, Flores Timur, NTT. Pada tahun 1979, NGO lingkungan di Indonesia mulai konsisten menyuarakan penolakan pembangunan reaktor energi nuklir di kawasan Muria, Jawa Tengah. Selang setahun, tepatnya pada tahun 1980 muncul gerakan menyelamatkan Teluk Jakarta dari polusi logam berat industri. Kemudian pada tahun 1982, muncul banyak gerakan sosial yang menentang pembangunan PLTN di Teluk Rembang.

Fakta yang menunjukkan bahwa gerakan lingkungan di Indonesia yang seringkali cenderung hanya menyoroti proyek-proyek

'mercusuar' tidak berhenti hanya disitu saja. Pada tahun 1982, di Cimanggis, Bogor, Jawa Barat terjadi gerakan perlawanan terhadap polusi PT Carbide Amerika Serikat (Wyrick dalam Aditjondro, 2003). Gerakan sosial lainnya terjadi di Sulawesi Selatan pada proyek penambangan perusahaan multinasional INCO, (*International Nickel Company*) Canada pada tahun 1987. Selanjutnya disebutkan dalam artikel *The Price of Dam Development in Central Java* yang dibuat oleh John Paterson (1989), pada 1989 terjadi gerakan penolakan besar-besaran terhadap upaya pemerintah yang hendak membuat waduk Kedungombo di Jawa Tengah (dikutip dari Aditjondro, 2003). Proyek yang pendanaannya mayoritas berasal dari World Bank tersebut diprotes lantaran dianggap merusak kelestarian lingkungan di wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan, selain itu juga gerakan perlawanan juga didasarkan pada tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dalam melakukan ganti rugi tanah dan relokasi masyarakat setempat. Selanjutnya pada awal-awal era milenium, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia di hebohkan dengan kemunculan gerakan lingkungan yang mengusung isu pencemaran di Teluk Buyat, di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh PT Newmont. Gerakan ini sendiri dipelopori oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang menilai bahwa wilayah Teluk Buyat tercemar logam berat. Pencemaran tersebut merusak ekosistem Teluk Buyat dan berdampak buruk bagi kondisi masyarakat setempat (Tempo, 16/12/2005).

Dari berbagai pemaparan di atas, mayoritas gerakan lingkungan di Indonesia dalam beberapa periode terakhir seolah masih terlalu banyak berkutat dalam tataran perjuangan isu-isu makro saja, belum banyak yang sampai kepada perjuangan yang bersifat komprehensif dan mampu menjangkau berbagai isu dan permasalahan di tingkat mikro. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, kini mulai banyak bermunculan gerakan lingkungan baru yang tidak hanya mengusung isu-isu makro saja, akan tetapi juga menjangkau berbagai isu dan permasalahan di tingkat mikro. Salah satu contohnya adalah berdirinya sebuah organisasi gerakan sosial di bidang lingkungan hidup yang bernama KOPHI (Koalisi Pemuda Hijau Indonesia).

Koalisi Pemuda Hijau Indonesia atau KOPHI pada awalnya dibentuk oleh sekelompok pemuda dari Jakarta yaitu Lidwina Marcella, Yudithia, Agusman Pranata, dan kawan-kawan yang memiliki kepedulian terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (KOPHI, 2010). KOPHI resmi berdiri pada tanggal 28 Oktober 2010 dan diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2010. KOPHI didirikan dengan tujuan utama untuk menjadi wadah bagi anak muda yang ingin menjadi bagian dari solusi masalah perubahan iklim sehingga mereka dapat bergerak untuk melakukan sebuah tindakan secara kolektif dan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang lestari. Lambat laun KOPHI mulai berkembang menjadi sebuah organisasi gerakan sosial di bidang lingkungan hidup yang cukup besar

dan diakui keberadaannya ditengah berbagai organisasi gerakan lingkungan lainnya yang semakin banyak jumlahnya.

Hingga tahun 2013, KOPHI sudah tersebar di 17 Provinsi di Indonesia, dan salah satunya adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. KOPHI Yogyakarta sendiri secara resmi berdiri pada 22 November 2011, tepatnya setelah pelaksanaan Kongres Nasional KOPHI I yang berlangsung di President University Jakarta. KOPHI pada umumnya dan KOPHI Yogyakarta pada khususnya, pada dasarnya tidak hanya menjadi forum komunikasi antara pemuda-pemudi Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap isu perubahan iklim, tapi juga diarahkan menjadi wadah untuk pengembangan kapasitas pemuda dan sumber informasi bagi pemuda-pemudi Indonesia terkait isu perubahan iklim dan permasalahan lingkungan hidup (KOPHI, 2011). Tak hanya itu, KOPHI Yogyakarta juga menjadi wadah nyata bagi para pemuda dalam melakukan aksi konkrit terkait dengan permasalahan lingkungan hidup.

KOPHI Yogyakarta memiliki visi yaitu menjadi wadah bagi generasi muda DI Yogyakarta untuk berkontribusi dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan misi KOPHI Yogyakarta yaitu: menjadi wadah berkreasi untuk kelestarian lingkungan; menjadi media informasi bagi pemuda terkait isu lingkungan; mengedukasi pemuda D.I. Yogyakarta untuk peduli



terhadap lingkungan; dan melakukan aksi nyata demi penyelamatan lingkungan hidup

Dalam pelaksanaannya KOPHI Yogyakarta selain bekerjasama dengan masyarakat, juga bekerjasama dengan NGO-NGO, akademisi, komunitas-komunitas lingkungan, dan tidak menutup kemungkinan juga bekerja sama dengan pemerintah. Fokus permasalahan yang disoroti oleh KOPHI Yogyakarta tidak terbatas pada isu-isu lingkungan hidup di tingkat makro saja, seperti menyoroti proyek-proyek besar yang memberikan dampak negatif lingkungan secara massif, akan tetapi KOPHI Yogyakarta dalam kegiatannya juga menyoroti isu-isu lingkungan hidup di tingkat mikro, misal dalam tataran *individual and community behavior* (kebiasaan-kebiasaan individu dan masyarakat).

## 2. *Volunterisme*

Istilah *volunterisme* sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Istilah *volunterisme* secara sederhana memiliki makna yaitu kesukarelawanan. Dalam Kamus Sosiologi (1992), *volunterisme* merujuk pada tindakan-tindakan aktor secara sukarela, dan tidak karena ditentukan oleh struktur sosial. Selanjutnya Robotham (1998) menyatakan bahwa *volunterisme* merupakan tindakan yang bersifat sosial atau kemasyarakatan, yang didorong oleh motif *altruistik*, dimana aktor tidak memperoleh upah, gaji atau keuntungan materiil. Secara umum, *volunterisme* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dimana seseorang

melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang berguna bagi kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan penuh komitmen, ketulusan, tanpa disertai imbalan materiil. Gawthrop dalam Corten (2002) menjelaskan bahwa kegiatan *volunterisme* dalam organisasi-organisasi sukarela mampu memberikan sumber tantangan dan kepuasan yang luar biasa, yang tidak didapatkan dalam pekerjaan-pekerjaan biasa bahkan dalam pekerjaan bergaji besar sekalipun.

Istilah *volunterisme* tidak dapat dipisahkan dengan istilah *volunteer*. Dalam konteks ini, *volunterisme* merupakan konsep tindakan, sedangkan *volunteer* merujuk pada aktor yang melakukan tindakan tersebut. Dubois dan Milley (2010) menjelaskan bahwa *volunteer* (sukarelawan) sebagai orang yang memainkan peran signifikan dalam pemberian pelayanan sosial tanpa mendapatkan imbalan materiil. Tokoh lainnya yaitu Ellis dan Noyes (1978) menyatakan bahwa *volunteer* adalah warga negara yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang mewujudkan semangat dan tindakan warga negara yang mempunyai komitmen dengan masyarakatnya dan dengan organisasi tempat mereka bekerja tanpa menghiraukan organisasinya termasuk sektor apa (dikutip dari Corten, 2002). Dalam pekerjaan seperti itu jiwa kesukarelawanan dapat teraktualisasi ketika individu sebagai manusia didorong oleh nilai-nilai, bertindak menurut cara-cara yang melebihi atau bahkan bertentangan dengan peran birokratis. Sejauh tindakan dan perilaku

individu tersebut tidak dibayar, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu komitmen kesukarelawanan (Corten, 2002).

Dalam perspektif Sosiologi *volunterisme* dipahami sebagai sebuah fenomena sosial yang melibatkan pola hubungan sosial dan interaksi diantara individu, kelompok dan asosiasi atau organisasi. Perhatian Sosiologi dalam studi tentang *volunterisme* dapat ditelusuri pada pernyataan klasik tentang *social order* dan solidaritas sosial, atau tingkat integrasi dari suatu masyarakat (Durkheim, 1983). Hal tersebut menunjuk pada jenis ikatan sosial yang mengikat anggota masyarakat satu dengan yang lain. Karena sifatnya yang sukarela, tidak dibayar, dan merupakan fenomena yang berorientasi secara kolektif, *volunterisme* merepresentasikan tipe ikatan sosial yang khas dan berbeda dari ikatan sosial yang lebih formal, jaringan (kekerabatan atau rekanan), sistem abstrak dari solidaritas yang dipaksakan seperti dalam *welfare state* atau negara kesejahteraan (Hustinx, et.al., 2010: 417). *Volunterisme* dianggap sebagai sebuah bentuk luar biasa dari solidaritas sosial yang mengikat masyarakat. Menurut Wuthnow (1991), tindakan *volunterisme* dipandang sebagai eskpresi primer dari nilai dasar manusia seperti Ketidakegoisan, empati, kepedulian terhadap orang lain, kedermawanan, tanggung jawab sosial, dan semangat kolekektif. Itu merupakan ekspresi mendasar dari rasa keterlibatan terhadap komunitas dan identitas kelompok, serta berkontribusi terhadap integrasi sosial individu (dalam Hustinx, et.al., 2010).

Berdasarkan pemaparan pada sub-bab sebelumnya tentang gerakan sosial dan pemaparan diatas tentang *volunterisme*, maka dapat disimpulkan bahwa Gerakan *volunterisme* merupakan suatu tindakan kolektif yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat melalui tindakan-tindakan kesukarelawanan. Ada beberapa tipe aktivitas yang dilakukan oleh *volunteer* (sukarelawan) dalam kegiatan *volunterisme*, antara lain :

a. Pembuatan kebijakan (*Policy Making*)

Dalam tipe ini, *volunteer* melakukan tindakan sukarela dengan memberikan pelayanan disatuan tugas, sebagai anggota direksi, atau sebagai anggota panel peninjau dan pengawas kebijakan.

b. Sukarelawan administratif (*Administrative Volunteers*)

Pada tipe aktivitas ini, *volunteer* atau sukarelawan memberikan kontribusi nyata mereka melalui aktivitas-aktivitas administratif, semisal melakukan pengolahan kata dan data, pemberkasan, mengatur dan mengoordinasi jadwal, surat menyurat. Aktivitas sukarelawan tipe ini banyak ditemui dalam organisasi-organisasi sosial , mereka bekerja sebagai staff-staff administrasi.

c. Sukarelawan Advokasi (*advocacy volunteers*)

Pada tipe aktivitas ini, *volunteer* atau sukarelawan melakukan kegiatan-kegiatan advokasi sebagai wujud nyata

kontribusi mereka. Sukarelawan membuat petisi untuk pihak tertentu, mengorganisasi dukungan masyarakat, mengadakan kampanye, mengadvokasi masyarakat dengan pihak pemerintah, melakukan penggalangan dana, dan lain-lain.

d. sukarelawan pelayanan langsung (*direct service volunteers*)

Dalam tipe aktivitas ini sukarelawan akan terlibat dalam aktivitas-aktivitas pelayanan langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka memberikan pelayanan seperti menjadi tutor, memberi bantuan pelayanan kesehatan, membantu mengatasi krisis atau masalah disuatu masyarakat. Sukarelawan juga bertindak untuk menghubungkan klien mereka utamanya yang tidak memiliki dukungan jaringan sosial dalam menghadapi masalah tertentu dengan sukarelawan lainnya yang terlatih. (Mitchell, dikutip dari Dubois dan Milley, 2010).

Pada pertemuan tingkat tinggi di New York tahun 1999, UNV (*United Nation Volunteers*) membuat kerangka analisis yang mengidentifikasi empat jenis kegiatan sukarelawan. Keempat jenis kegiatan sukarelawan tersebut antara lain: (1) kegiatan gotong royong atau swadaya (*mutual aid or self-help*); (2) kegiatan filantropi; (3) kegiatan partisipasi; dan (4) kegiatan advokasi dan kampanye. Secara konseptual empat kategori tersebut sifatnya tidak selalu berdiri sendiri secara eksklusif, akan tetapi ada keterkaitan satu sama lain. Sebagai

contoh, sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan filantropis atau lembaga pelayanan seringkali juga memiliki keterlibatan yang baik dalam kegiatan advokasi dan kampanye.

Jenis kegiatan kesukarelawanan yang pertama adalah kegiatan gotong royong atau swadaya (*mutual aid or self-help*). Di banyak bagian dunia saat ini kegiatan gotong royong, saling membantu, menyediakan sistem utama dalam upaya pemberian dukungan sosial dan ekonomi untuk mayoritas penduduk. Kegiatan kesukarelawan sebagai ungkapan swadaya atau gotong royong memainkan peran utama dalam kesejahteraan masyarakat, mulai dari lingkup terkecil, ikatan pertalian keluarga, sampai yang lebih formal seperti kelompok kesejahteraan. Kegiatan kesukarelawanan yang kedua adalah filantropi. Menurut UNV (1999), Filantropi merupakan kegiatan pelayanan sukarela kepada orang lain dengan mekanisme yang lebih terorganisir. Yang membedakan filantropi dengan jenis kegiatan *self-help* ialah karakteristik sasaran kegiatannya. Sasaran utama kegiatan pelayanan filantropi bukanlah untuk dirinya sendiri atau anggota kelompoknya seperti dalam jenis kegiatan *self-help*, tetapi sasarannya adalah pihak ketiga atau pihak eksternal. Bentuk kegiatan kesukarelawanan seperti ini dapat kita jumpai dalam komunitas-komunitas, NGO atau organisasi sukarela

Selanjutnya, jenis ketiga dari kegiatan sukarela disebut dengan kegiatan 'partisipasi' Kegiatan ini merujuk pada peranan yang dimainkan oleh individu-individu dalam proses pemerintahan, mulai perwakilan dari

badan konsultasi pemerintah untuk keterlibatan pengguna dalam proyek-proyek pembangunan daerah. Jenis kegiatan sukarela terakhir adalah kegiatan advokasi dan kampanye. Sukarelawan mengambil peran sebagai pelaksana kegiatan advokasi dan kampanye terhadap berbagai isu atau permasalahan tertentu. Mereka melakukan kegiatan advokasi, kampanye, serta penggalangan dukungan dengan berbagai cara, seperti pembuatan petisi, aktivitas kampanye melalui berbagai media, dan lain-lain. Melalui advokasi mereka berusaha mengakomodasi tuntutan masyarakat, melalui kampanye mereka berusaha mempromosikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu tertentu secara luas.

KOPHI Yogyakarta sendiri merupakan organisasi gerakan sosial di bidang lingkungan dengan basis *volunterisme*. Mereka yang tergabung dalam organisasi KOPHI Yogyakarta berstatus sebagai seorang *volunteer*. Sebagai sebuah organisasi gerakan sosial, KOPHI Yogyakarta membuka ruang bagi para volunteer untuk melakukan beragam aktivitas *volunterisme*. Bagi peneliti fenomena tersebut sangatlah menarik, perlu dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam. Menurut peneliti, paparan konsep *volunterisme* dan kajian tentang tipe-tipe aktivitas *volunterisme* diatas dapat dijadikan sebagai acuan relevan untuk melakukan analisis terkait aktivitas-aktivitas *volunterisme* yang dilakukan oleh para *volunteer* di KOPHI Yogyakarta.

### 3. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional merupakan teori Sosiologi yang mulai muncul pada akhir era 1960-an. Dalam perkembangannya, teori pilihan rasional memiliki keterkaitan yang erat dan dipengaruhi oleh teori pertukaran. Meskipun dipengaruhi oleh teori pertukaran, Hechter dan Kanazawa (1973) menjelaskan bahwa teori pilihan rasional umumnya berada pada pinggiran aliran utama teori Sosiologi (dikutip dari Ritzer, 2004).

James Coleman merupakan tokoh yang memelopori teori ini melalui esainya yang berjudul '*Purposive Action Framework*' (1973), yang menjelaskan tentang sebuah analisis tindakan kolektif. Melalui karyanya ini pula, Coleman berusaha mempertahankan konsep bahwa untuk merumuskan definisi pilihan rasional dalam bidang kajian ilmu Sosiologi, fokus studi perlu diarahkan pada penjelasan fenomena sosial makro berdasarkan pilihan yang dibuat oleh aktor sosial pada tingkat mikro. Fokus pada tindakan rasional individu ini dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Selanjutnya, pada tahun 1989 Coleman mendirikan Jurnal *Rationality and Society*, sebagai media untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Selain itu, pada tahun 1990, Coleman kembali memberikan kontribusi signifikan kepada perkembangan teori ini, dengan menerbitkan buku yang sangat



berpengaruh yaitu '*Foundations of Social Theory*' Melalui berbagai upaya James S. Coleman, teori tindakan rasional kemudian menjadi salah satu teori yang penting dalam kajian Sosiologi masa kini (Chris, 1995).

Teori pilihan rasional Coleman memiliki gagasan dasar bahwasanya tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan. Tujuan dan tindakan tersebut ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Unsur utama dalam teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Coleman terletak pada aktor dan sumber daya. Seorang aktor dalam teori pilihan rasional diasumsikan memiliki maksud/ tujuan dalam setiap tindakannya. Tidak ada tindakan yang tidak bertujuan. Aktor diasumsikan selalu memiliki kerangka preferensi (kerangka pilihan) yang bersifat relatif tetap dan stabil. Pilihan yang akhirnya dibuat oleh aktor didasarkan ada kerangka preferensi yang dia miliki. Sumber daya dalam konteks teori pilihan rasional didefinisikan sebagai sesuatu yang menarik perhatian dan dikehendaki serta dapat dikontrol oleh aktor. Ketika melakukan tindakan, aktor akan terlebih dahulu melakukan seleksi terhadap pilihan yang tersedia dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti prioritas tujuan, termasuk sumber daya yang dimiliki dan juga kemungkinan keberhasilan dari tindakan yang dilakukannya. Dalam perspektif teori pilihan rasional, Individu akan selalu dilihat sebagai aktor yang sangat rasional yang mampu melakukan hal yang terbaik untuk mencapai tujuan, memuaskan keinginan dan memaksimalkan keuntungannya. Sejalan dengan pendapat Coleman, Habermas dalam (Haryanto, 2010) menyatakan bahwa teori

pilihan rasional secara tegas memformulasikan asumsi-asumsi, semisal individu dipandang sebagai aktor yang memiliki aturan dan konsistensi terhadap preferensinya serta mampu memilih cara atau strategi yang dapat memaksimalkan utilitas bagi diri mereka.

Teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Coleman dimulai dengan analisis tindakan dan relasi-relasi sosial elementer. Coleman mengelaborasi pandangan teori pertukaran klasik, yang menjelaskan pada dasarnya individu memiliki kepentingan dan mereka mengontrol sumber daya dan persaingan, akan tetapi mereka tidak mampu secara penuh mengontrol sumber daya dan persaingan tersebut guna memenuhi kepentingannya, akhirnya individu akan melakukan pertukaran. Coleman kemudian mengembangkan teorinya dengan lebih menekan pada struktur tindakan seperti kewenangan, sistem kepercayaan, perilaku kolektif, dan norma-norma. Fokus terhadap perilaku kolektif merupakan salah satu contoh pendekatan Coleman dalam menganalisis fenomena makro (Zablocki, 1996). Dengan menjelaskan perilaku kolektif yang memiliki ciri tidak stabil Coleman berusaha membuktikan bahwasanya teori pilihan rasional dapat menjelaskan semua fenomena makro, tidak hanya terbatas pada tataran fenomena yang teratur dan stabil saja.

Perspektif teori pilihan rasional pada dasarnya sangat dekat dengan teori pertukaran sosial, yaitu berusaha menjelaskan hubungan yang bersifat personal maupun impersonal. Lensa analisis teori pilihan rasional secara mendasar berada dalam tataran mikro, yang selanjutnya menjadi

berkembang menjadi fondasi bagi analisis di tingkat meso dan makro karena adanya proses pertukaran. Apabila dilihat secara general tanpa membatasi tingkatan analisis baik mikro, meso maupun makro, pertukaran sosial apapun tipenya merupakan representasi dari usaha individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan personalnya melalui pilihan yang dibuatnya. Dalam perspektif teori pilihan rasional kontemporer, dijelaskan bahwa kepentingan-kepentingan personal individu pada dasarnya akan bercampur dengan kepentingan-kepentingan sosial karena pengaruh partisipasi individu dalam jaringan hubungan sosial dan keterlibatan organisasional. Individu tidak selalu mengejar kepentingan dirinya semata, tetapi seringkali individu juga melakukan tindakan untuk kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara luas.

Teori pilihan rasional mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama pada kurun waktu tahun 1980-1990. Pada kurun waktu tersebut muncul tokoh-tokoh baru, yang kemudian membuat teori pilihan rasional tidak hanya terus menerus identik dengan sosok James S. Coleman. Salah satu tokoh yang cukup terkenal dengan pemikiran-pemikiran teori pilihan rasional di era ini adalah Karl-Dieter Opp (1982). Opp menjelaskan bahwasanya *Rational Choice Theory* merupakan suatu mekanisme dari sumber-sumber intelektual yang dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan sosial (dalam Situmorang, 2007).

Karl-Dieter Opp (dikutip dalam Situmorang, 2007: 20) mengajukan dua versi konsep *rational choice* (pilihan rasional), dalam

upaya untuk memahami dan menjelaskan mengapa sejumlah orang berpartisipasi di dalam aksi kolektif sedangkan orang yang lainnya tidak. Konsep pertama yaitu model *rational choice* umum, yang kedua adalah model *rational choice* spesifik. Masing-masing model tersebut memiliki hipotesis dan implikasi dalam menjelaskan aksi kolektif. Selanjutnya, Opp menjelaskan secara lebih rinci setiap model pilihan rasionalnya. Berkaitan dengan model *rational choice* umum, Opp membaginya menjadi tiga hipotesis. Hipotesa pertama yaitu *preference* (pilihan utama) yang merupakan penentu aksi ketika aksi tersebut mampu memuaskan pilihan mereka. Hipotesa kedua adalah kendala dan kesempatan mendorong individu-individu terlibat dalam aksi kolektif. Hipotesis ketiga adalah maksimalisasi kegunaan bahwa individu-individu memilih aksi yang akan memberikan kegunaan lebih besar atau kerugian lebih kecil kepada mereka.

Sedangkan, mekanisme memilih secara rasional memiliki empat preposisi yang menjelaskan mengapa individu terlibat dalam aksi-aksi kolektif. Preposisi pertama menjelaskan bahwa perilaku di dalam situasi tertentu individu memilih, sangat tergantung dengan persepsi individu terhadap alternatif-alternatif perilaku yang ada. Preposisi kedua menjelaskan bahwa konsekuensi perilaku yang dibayangkan dalam sebuah aksi, mempengaruhi kinerja individu tersebut. Apabila penilaian yang didapatkan semakin positif, maka aksi-aksi tersebut memiliki kemungkinan besar untuk diikuti oleh individu-individu. Preposisi ketiga

menjelaskan, jika hasil perilaku yang diharapkan memiliki tingkat kepastian yang besar, maka keinginan individu untuk terlibat dalam suatu aksi kolektif akan semakin kuat. Selanjutnya, preposisi keempat menjelaskan bahwa bila 'produk' yang akan dihasilkan lebih besar dari 'produk yang diharapkan oleh individu, maka individu tersebut lebih mungkin terlibat dalam gerakan sosial (Opp, dikutip dalam Situmorang, 2007: 21-22).

Sebagai sebuah teori yang menjadi salah satu pendekatan alternatif dalam teori sosiologi umum, teori pilihan rasional mengalami perluasan secara signifikan pada bidang kajian substantif, seperti organisasi, ketimpangan dan sosiologi politik dan kemudian terus berlanjut dalam kajian gerakan sosial yang kemudian menjadi sangat menonjol. Teori pilihan rasional memang memiliki relevansi dan kedekatan dalam bidang kajian gerakan sosial. Sebagaimana pula yang dijelaskan Godwin dan Jasper (2006) bahwa dalam berbagai studi dan literatur-literatur tentang gerakan sosial, model-model pendekatan pilihan rasional dan mobilisasi sumber daya memang mendominasi. Meskipun demikian, penggunaan teori pilihan rasional sebagai pendekatan kajian gerakan sosial bukanlah tanpa kritik. Sebagian kecil kalangan menilai pendekatan ini tidak bisa secara akurat mengeksplorasi ruang lingkup 'emosi' yang secara inisial dapat menarik individu untuk terlibat dalam gerakan sosial maupun tetap mempertahankan afiliasinya dalam suatu gerakan sosial tertentu. Smelser (1997) mengkritisi teori pilihan rasional yang menurutnya memiliki

paradoks kelemahan, ia menilai individu adalah aktor yang tidak mempunyai alasan rasional dalam gerakan-gerakan sosial. Pendapat tentang kelemahan teori pilihan rasional tersebut akhirnya berusaha diatasi dan dimentahkan dengan adanya skema kalkulasi *cost-benefit* yang menjelaskan alasan mengapa seseorang akhirnya memutuskan untuk terlibat dan berafiliasi dalam gerakan-gerakan sosial dan organisasi-organisasi gerakan sosial. Pandangan lainnya yang menguatkan hal tersebut dikemukakan oleh Agger (2008), dalam teori pilihan rasional memang terdapat konsep perhitungan rasional, yang dapat digunakan menjelaskan tindakan dan perilaku-perilaku sosial individu, termasuk diantaranya keputusan individu terlibat dan berafiliasi dalam gerakan-gerakan sosial (dikutip dari Korten, 2002).

Teori pilihan rasional menurut peneliti sangat tepat dan relevan untuk dijadikan dasar analisis penelitian tentang fenomena gerakan *volunterisme* di kalangan pemuda perkotaan yang mengambil kasus di KOPHI (Koalisi Pemuda Hijau Indonesia) Regional Yogyakarta. Para pemuda yang tergabung di KOPHI Yogyakarta, sebuah organisasi gerakan sosial di bidang lingkungan dengan basis *volunterisme* tentu akan mengorbankan banyak hal. Mereka tidak mendapatkan imbalan materiil, mereka justru mengorbankan pikiran, waktu, tenaga, dan bahkan biaya yang kadang tidak sedikit pula jumlahnya. Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa para pemuda akhirnya memutuskan untuk terlibat dalam gerakan *volunterisme* semacam itu. Dari perspektif teori

pilihan rasional, tindakan *volunterisme* yang dilakukan oleh para pemuda tentu bukan tanpa alasan. Teori pilihan rasional dinilai mampu untuk menganalisis mengapa tindakan tersebut bisa terjadi. Teori pilihan rasional dapat mengungkap dan menjelaskan kerangka-kerangka preferensi yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan tindakan *volunterisme*.

Tindakan *volunterisme* dalam gerakan sosial memang tidak memberikan imbalan materiil kepada individu. Meskipun demikian, dalam konteks ini individu bukan berarti mengesampingkan sepenuhnya aspek keuntungan bagi dirinya. Teori pilihan rasional memandang bahwa sebagai aktor rasional individu tetap memiliki tujuan, pengharapan dan akan senantiasa berusaha untuk memaksimalkan utilitas bagi dirinya, bahkan dalam konteks tindakan sukarela sekalipun. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan oleh seorang individu, harapan keuntungan bagi dirinya juga akan jauh lebih besar. Teori pilihan rasional dapat menganalisis lebih dalam konsepsi-konsepsi dasar tersebut. Teori pilihan rasional dapat menjelaskan apa tujuan, kegunaan atau keuntungan yang sebenarnya ingin dicapai oleh setiap individu melalui kegiatan-kegiatan *volunterisme*. Dengan demikian, tindakan *volunterisme* yang dilakukan pemuda dalam kaitannya gerakan sosial dapat dimengerti secara mendalam, menyeluruh, menyangkut aspek-aspek utama yang mendasarinya, tidak hanya dimaknai dari sisi luarnya saja.

## B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian kualitatif yang akan penulis lakukan ini cukup relevan dengan penelitian yang berjudul “Konstruksi Makna *Social Volunteer* Oleh Relawan Anak Jalanan Dalam Kegiatan Belajar Mengajar” oleh Mela Permata Erza pada dari jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif relawan menjadi *social volunteer* pengajar anak jalanan, untuk mengetahui pemaknaan relawan mengenai *social volunteer* anak jalanan dan mengetahui pengalaman relawan selama menjadi *social volunteer* anak jalanan. Subjek penelitian ini adalah relawan anak jalanan Rubel (Rumah Belajar) Sahaja yang terlibat aktif dalam kegiatan relawan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi fenomenologi konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann.

Hasil penelitian ini yaitu (1) motif relawan menjadi *social volunteer* anak jalanan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni motif yang merujuk masa lalu, motif-karena yaitu karena penasaran dengan kehidupan anak jalanan, karena peduli dengan masalah pendidikan anak jalanan, dan karena ingin membahagiakan anak jalanan. Lalu motif merujuk pada masa depan, motif-untuk, yaitu untuk belajar dan mengasah diri, untuk berbagi dengan anak jalanan, dan untuk melaksanakan bagian dari ibadah. (2) Pemaknaan relawan mengenai *social volunteer* anak jalanan yaitu relawan sebagai panggilan hati, sebagai bentuk pengabdian, dan relawan sebagai kegiatan yang bermanfaat. (3) Pengalaman relawan menjadi *social*



*volunteer* anak jalanan terdapat empat bagian, yaitu komunikasi dan pendekatan awal relawan dengan anak jalanan, cara dan metode pengajaran relawan terhadap anak jalanan, lalu pengalaman suka dan pengalaman duka relawan anak jalanan.

Secara umum, relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan aspek yang dikaji, yaitu sama-sama mengkaji tentang *volunteer*, dan motif yang mendorong individu menjadi seorang *volunteer*. Perbedaan terletak pada obyek yang diteliti, penelitian ini berfokus pada organisasi yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan yaitu Rumah Belajar Sahaja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada organisasi gerakan sosial bidang lingkungan hidup yaitu KOPHI Yogyakarta. Secara lebih spesifik, fokus kajian terhadap obyek yang diteliti pun juga berbeda, penelitian Mela Permata Erza ini berfokus pada makna *volunteer* dalam konteks konstruksi realitas sosial. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokusnya mengarah kepada *volunterisme* dalam konteks sebagai suatu gerakan sosial.

2. Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang disusun oleh Wahyu Ary Nugroho dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang berjudul “Motif Relawan Kemanusiaan Rumah Zakat Cabang Depok”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dan pola rekrutmen relawan rumah zakat, dan

untuk mengetahui motivasi apa yang mendasari orang terlibat menjadi relawan rumah zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *field research*. Data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang berkompeten di Rumah Zakat Cabang Depok, dan dengan para relawan yang tergabung dalam relawan Rumah Zakat Cabang Depok. Data sekunder penelitian berasal dari studi kepustakaan, media cetak dan elektronik serta website.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam manajemen pengelolaan rumah zakat terdapat empat jenis kategori, yaitu : relawan muda, relawan ahli, relawan inti dan relawan ahli khusus. Di rumah zakat pengelolanya yang mendapatkan penghasilan atau *fee* tetap setiap bulannya ialah koordinator relawan tiap cabang yaitu sebesar Rp. 300.000/bulan. Sedangkan relawan yang lain hanya mendapatkan *fee* pengganti transport dan makan saja pada setiap kegiatan, yaitu sekitar Rp. 15.000- Rp. 50.000. Adapun relawan ahli khusus ia memperoleh *fee* yang lebih besar sekitar Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000

Pola rekrutment relawan rumah zakat ialah dengan pendidikan dasar yang diadakan setahun sekali. Orang yang berhak menjadi relawan ialah bebas, berasal dari golongan, latar belakang pendidikan dan aktifitas apapun, yang terpenting mereka mau untuk terlibat dan berkontribusi di Rumah Zakat. Motif yang menyebabkan orang ingin terlibat menjadi relawan ialah karena motif sosial. Hal ini disebabkan karena tujuan utama mereka yaitu agar dapat memberdayakan masyarakat dan membantu orang

lain. Kebutuhan ini muncul karena seseorang ingin bergaul dalam masyarakat, kebutuhan berafiliasi dengan sesamanya, kebutuhan mencari hubungan yang bermakna. Meskipun tak jarang para relawan bergabung karena alasan ajakan teman dan hanya ikut-ikutan saja.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian dari Wahyu Ary Nugroho memiliki keterkaitan dalam beberapa aspek. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang relawan (*volunteer*) dan motif mereka menjadi relawan dalam suatu organisasi. Perbedaannya, obyek penelitian ini adalah organisasi sosial keagamaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengkaji organisasi gerakan sosial lingkungan hidup. Obyek penelitian ini tidak sepenuhnya menerapkan konsep dasar *volunterisme* kepada para *volunteer* dalam pelaksanaan organisasi, karena relawan seringkali mendapatkan *fee* dari kegiatan yang mereka lakukan. Itu berbeda dengan obyek penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu di KOPHI Yogyakarta yang secara mendasar benar-benar menerapkan konsep *volunterisme* terhadap para *volunteer* yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan organisasi. Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini berfokus pada perspektif ekonomi dan manajemen dalam analisis pembahasannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada perspektif sosiologis yaitu membahas *volunteer* dan *volunterisme* dalam konteks sebagai suatu gerakan sosial.

3. Penelitian tentang “Partisipasi Anggota dan Kader dalam Membangun Modal Sosial Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal” oleh Taqwal Fu’ad. Pendidikan Sosiologi. FIS UNY 2013 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi, faktor pendorong dan penghambat partisipasi, serta peran partisipasi dalam membangun modal sosial Gerakan Pemuda Ansor Pageruyung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara yang didukung oleh data hasil dokumentasi. Subjek penelitian adalah anggota dan pengurus Gerakan Pemuda Ansor Pageruyung. Teknik sampling yang digunakan *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini yaitu bentuk partisipasi dapat berupa fisik dan non fisik yaitu uang maupun tenaga dari para anggotanya. Faktor pendorong timbulnya partisipasi, dari segi motivasi adalah kesadaran para anggota dan keterpaksaan. Faktor lain kharisma para ulama, pengaruh sosialisasi dalam pendidikan. Faktor penghambat yaitu dari segi ekonomi, situasi politik internal NU. Peran partisipasi dalam membangun *trust* akan memunculkan sikap saling percaya diantara para anggota. Peran partisipasi dalam membangun norma adalah membentuk dan sekaligus menjadi motor penggerak berlangsungnya pelaksanaan aturan-aturan yang disepakati bersama dan peran partisipasi dalam membangun jaringan adalah

mempertegas tipologi hubungan-hubungan sosial dan membentuk hubungan-hubungan sosial baru.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada sub-bagian aspek kajian, yaitu tentang gerakan sosial, faktor pendorong keterlibatan individu dalam gerakan sosial dan tindakan kesukaralewanan (*volunterisme*) anggota gerakan sosial. Hasil penelitian organisasi gerakan sosial pemuda Ansor menunjukkan bahwa anggota seringkali berpartisipasi dalam bentuk fisik maupun non fisik, yaitu uang maupun tenaga dari para anggotanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat antara gerakan sosial dengan tindakan sukarela (*volunterisme*) dari individu-individu yang terlibat didalamnya. Perbedaannya, penelitian ini obyek kajiannya adalah gerakan sosial keagamaan, sedangkan peneliti obyek kajiannya adalah gerakan sosial lingkungan hidup. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus pembahasannya, penelitian ini fokus utama analisa pembahasannya ialah modal sosial, yakni berusaha untuk mengetahui partisipasi anggota dalam membangun modal sosial Gerakan Pemuda Ansor. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pembahasannya terletak pada nilai-nilai tindakan *volunterisme* dan kaitannya dengan gerakan sosial, bertujuan mengetahui motif pemuda terlibat dalam gerakan *volunterisme*, tipe gerakan sosial dan tipe aktivitas *volunterisme* serta dampak aktivitas *volunterisme* di KOPHI Yogya bagi diri mereka

### C. Kerangka Pikir

Permasalahan lingkungan hidup yang muncul saat ini sudah menjadi isu global dan cukup mengkhawatirkan. Mulai dari masalah pencemaran hingga aktivitas industri dan pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem alam. Hal ini tidak lain dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga membawa konsekuensi terhadap lingkungan hidup. Berbagai permasalahan lingkungan tersebut memicu munculnya berbagai organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan. Salah satunya yaitu KOPHI (Koalisi Pemuda Hijau Indonesia) yang saat ini sudah tersebar di 17 propinsi di Indonesia, termasuk di Yogyakarta.

KOPHI Yogyakarta sebagai sebuah organisasi gerakan sosial lingkungan dibentuk oleh pemuda kota yang terdorong untuk melakukan suatu tindakan nyata guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Pemuda sebagai agen perubahan, mempunyai potensi yang luar biasa. Mereka memiliki semangat, ide-ide, inovasi dan kontribusi dalam berbagai bentuk aksi nyata. Selain itu, latar belakang pendidikan yang dimiliki, membuat pemuda kota lebih sadar dan tanggap terhadap segala peristiwa yang terjadi disekitarnya. Didasari potensi dan semangat yang dimiliki inilah kemudian mereka melibatkan diri menjadi *volunteer* di organisasi KOPHI (Koalisi Pemuda Hijau Indonesia) Regional Yogyakarta yang dikelola dan dijalankan sepenuhnya oleh para pemuda dengan basis *volunterisme*.

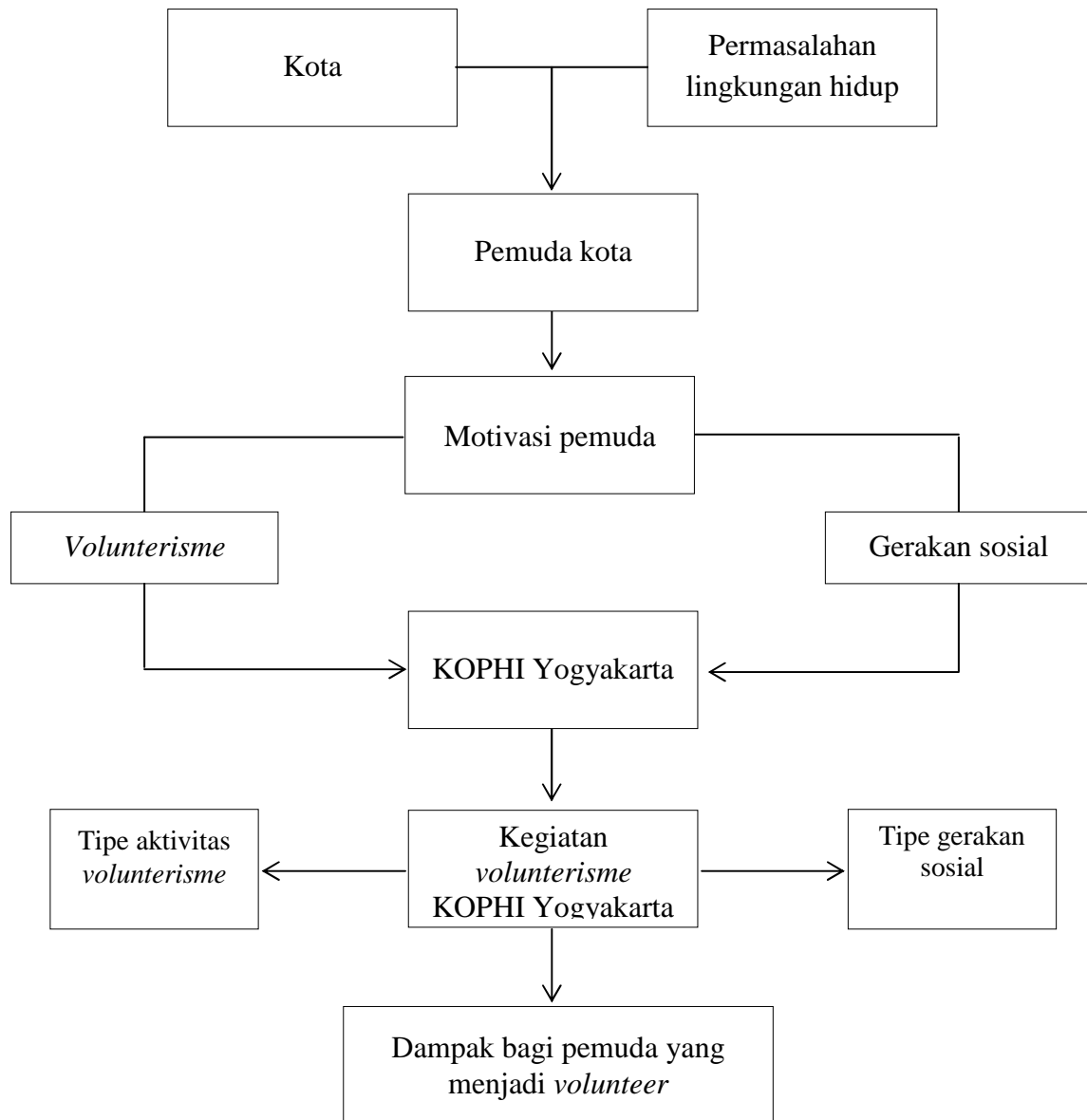
Secara kontekstual keterlibatan individu dalam gerakan sosial dan tindakan *volunterisme* terkesan tidak rasional. Individu bersedia untuk melakukan berbagai macam kegiatan tanpa mendapatkan imbalan materiil, padahal mereka telah mengorbankan banyak tenaga, pikiran, waktu dan bahkan tak jarang mengeluarkan uang dalam jumlah uang yang tidak sedikit pula. Apabila dianalisis lebih dalam, tindakan tersebut tentu tidak terjadi begitu saja tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas. Dalam perspektif teori pilihan rasional, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu pada dasarnya merupakan tindakan rasional. Terkait dengan tindakan *volunterisme* sekalipun, teori pilihan rasional memandang bahwa individu memiliki motivasi, pertimbangan dan kerangka pilihan, memiliki tujuan serta berusaha untuk memaksimalkan utilitas bagi diri mereka.

Gerakan sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan *volunterisme*. *Volunterisme* memiliki muatan nilai kemanusiaan yang mendasari seseorang untuk berkontribusi dalam suatu gerakan sosial. Sebagai organisasi gerakan sosial berbasis *volunterisme*, KOPHI Yogyakarta terus melakukan tindakan-tindakan yang berkesinambungan sebagai bentuk aksi yang terlembaga dan wujud kematangan dari gerakan sosial itu sendiri. KOPHI Yogyakarta secara konsisten merancang, melaksanakan berbagai program-program dan kegiatan *volunterisme* terkait permasalahan lingkungan hidup. Program-program ataupun kegiatan *volunterisme* tersebut dirancang dan dilaksanakan oleh para volunteernya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KOPHI Yogyakarta beserta para *volunteer*-nya dalam konteks sebagai gerakan sosial, organisasi non

pemerintah (NGO) dan organisasi sukarela, dapat menjadi dasar untuk mengklasifikasikan dan menjelaskan tipe gerakan sosial dan tipe aktivitas *volunterisme*. Pemaparan dan pengklasifikasian tersebut dilakukan melalui analisis terhadap berbagai aspek kegiatan yang ada, seperti sistem dan pola pelaksanaannya, bentuk kegiatan, cakupan dan tujuan kegiatan, dan lain-lain

Keterlibatan pemuda dalam kegiatan-kegiatan organisasi gerakan sosial KOPHI Yogyakarta sebagai seorang *volunteer* tentu menimbulkan dampak bagi mereka. Akan dianalisis apa saja dampak atau manfaat yang mereka peroleh selama keikutsertaan mereka dalam kegiatan *volunterisme* di organisasi gerakan sosial KOPHI Yogyakarta. Dampak tersebut bisa dibahas dalam konteks dampak secara personal maupun sosial. Dampak atau manfaat yang mereka peroleh apakah sudah sesuai dengan harapan dan tujuan awal mereka, lantas apakah kegiatan *volunterisme* mampu memberikan utilitas yang maksimal bagi diri mereka.





**Bagan 1.0. Kerangka Pikir**